TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN : 2810-0395
e-ISSN : 2810-0042

Terindeks : Moraref, Google Scholar, Base, dan OneSearch.

ANALISIS MODEL PEMBIYAAN DANA BOS DAN BOP PADA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG PERNAH DITERAPKAN DI INDONESIA

Samsul Hadi
STIT Palapa Nusantara Lombok NTB
irsyadsamsul@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the financing model for BOS Funds and BOM/BOP in educational institutions that have been implemented in Indonesia. The research used descriptive qualitative. Data collection techniques using observation, and document study. Research results (1). The education financing system in Indonesia is borne by the central government, regional governments and the community. The education financing models in Indonesia are sourced from a). Central Government and Local Government in the form of BOS Fund (School Operational Assistance), BOP (Education Operational Assistance) and b). Parents / Guardians of Students. The types of expenditures by parents/guardians for education include: 1) Base Fee, 2) Monthly Tuition / Tuition Fees, 3) Mid-Semester Examination Fees, 4) End of Semester Examination Fees, Extracurricular Activities Fees, 6) Practicum Activities Fees , 7) Purchase of Textbooks / LKS, 8) Purchase of School Uniforms, 9) Expenses for Field Trips / Mental Development / Retreats, 10) Social Donations, 11) Other expenses. (2) Analysis of education financing models that have been applied in Indonesia such as BOS/BOP and others. In the government regulations for the period of disbursement and reporting of School and Madrasah and PAUD BOS funds which the authors have classified, there are advantages and disadvantages in their implementation. In the initial period there was the involvement of Provincial and District BOS Managers so that in the process of filing the disbursement and reporting of BOS Funds they could be guided and supervised directly. Meanwhile, in the latest regulation, the process of filing for disbursement and reporting of BOS Funds is directly guided and fostered by the Central BOS manager.

Keywords: *Analysis, Financing Model and BOS/BOP*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pembiayaan Dana BOS dan BOM/BOP pada lembaga pendidikan yang pernah diterapkan di Indonesia. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian (1). Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia bahwa dibebankan kepada pemerintah Pusat, pemerintah Daerah dan Masyarakat. Model-model pembiayaan pendidikan di Indonesia yaitu bersumber a).Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa bantuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOP (Bantuan

Operasional Pendidikan) dan b). Orang Tua/ Wali Siswa. Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan antara lain: 1) Uang Pangkal, 2) Uang Sekolah Bulanan / SPP, 3) Biaya Ulangan Tengah Semester, 4) Biaya Ulangan Akhir Semester, Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler, 6) Biaya Kegiatan Praktikum, 7) Pembelian Buku Pelajaran / LKS, 8) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah, 9) Biaya Karyawisata / Bina Mental / Retret, 10) Sumbangan Sosial , 11) Biaya-biaya lainnya. (2) Analisis model-model pembiayaan pendidikan yang pernah diterapkan di Indonesia seperti BOS/BOP dan lain-lain. Dalam regulasi pemerintah periode pencairan dan pelaporan dana BOS Sekolah dan Madrasah dan PAUD yang telah penulis klasifikasi terdapat kelebihan dan kekurangan dalam implementasinya. Pada periode awal terdapat keterlibatan Pengelola BOS Provinsi dan Kabupaten sehingga dalam proses pemberkasan pencairan dan pelaporan Dana BOS dapat dibimbing dan diawasi langsung. Sedangkan dalam regulasi terakhir proses pemberkasan pencairan dan pelaporan Dana BOS langsung dibimbing dan dibina oleh pengelola BOS Pusat.

Kata Kunci : Analisis, Model Pembiayaan dan BOS/BOP

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.[1] Pendidikan telah tersedia melalui jalur formal, informal, dan informal.

Mewujudkan tujuan Pendidikan maka tidak lepas dari pembiayaan pendidikan. Pembiayaan dalam pendidikan merupakan bagian unsur terpenting dalam pendidikan. Sulistyoningrum dalam Ferdi W. Mengemukakan bahwa Biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.[2] Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Lebih lanjut, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi: a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang

[1] Undang-Undan RI, *Sistim Pendidikan nasional*, 2003

[2] Ferdi W.P, Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Financing of education: a theoritical study, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, 4, Desember 2013, 565

melekat pada gaji; b) bahan atau peralatan Bahan habis pakai pendidikan; c) Biaya operasional tidak langsung di bidang pendidikan berupa listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.

Ferdi W.P[3] hasil penelitiannya menemukan bahwa: "1) faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan, antara lain: a) kenaikan harga; b) perubahan gaji guru; c) perubahan populasi dan kenaikan prosentasi anak di sekolah negeri; d) meningkatnya standar pendidikan; e) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; f) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi;

Penelitian Fatra dan Edi Harapan,[4] Dosen Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Palembang yang berjudul Penerapan Prinsip dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Palembang, menunjukkan hasil bahwa sumber pendanaan APBD dan APBN. Alokasi dana tersebut pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh pembukuan dan kepala sekolah dan diketahui oleh komite sekolah setiap bulan, meliputi tanggal penerimaan, bukti pengeluaran, dan perincian pengeluaran.

Sementara penelitian tentang proses pelaksanaan penggunaan keuangan sekolah/ Madrasah peneltian telah dilakukan Durotun Nafisah, dkk.[5] Penelitian berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah, menemukan hasil bahwa "Proses perencanaan keuangan di MA Ribhul Ulum dimulai dengan mengadakan rapat pleno, mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran, menyusun, mengusulkan, revisi, hingga pengesahan RAPBM. Dokumen-dokumendalam pencatatan keuangan di MA Ribhul Ulum seperti buku kas, faktur, buku pembantu kas, buku penerimaan gaji, buku pembantu bank, laporan keuangan, dan buku tabungan telah mampu menjelaskan kondisi keuangan yang ada di MA Ribhul Ulum".

---

[3] Ferdi W.P, 2013

[4] Fatra dan Edi Harapan, Penerapan Prinsip dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Palembang,*JurnalManajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan***,** Volume 2, No. 1, 2017, 46

[5] Durotun Nafisah, dkk**,** Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah, *Economic Education Analysis Journal*, 6-3, 2017, 788

Sedangkan penelitian tentang sumber-sumber pembiayaan pendidikan secara internasional, telah dilakukan oleh Nicolae Todeaa dan Doina Maria Tileab[6] berjudul Comparative analysis between the models for financing of education in Romania and the United Kingdom, menemukan bahwa pembiayaan Pengalaman internasional telah menunjukkan bahwa pembiayaan publik untuk pendidikan tinggi, untuk memenuhi persyaratan saat ini, kemungkinan besar bercampur: pendanaan inti, alokasi anggaran, memastikan akses ke pendidikan, kualitas dan konsistensi pengajaran; dan tambahan dana yang diperoleh dari usaha dan sumber daya lembaga itu sendiri, selain dari APBN.

Berdasarkan uraian dan temuan penelitian diatas maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam tulisannya ini adalah sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia, model-model pembiayaan pendidikan di Indonesia dan analisis model-model pembiayaan pendidikan yang pernah diterapkan di Indonesia seperti BOS/BOM dan lain-lain.

METODE

Penelitian analisis model pembiayaan BOS dan BOP yang pernah diterapkan di Indonesia ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu prosedur sistematis yang telah disepakati untuk mengungkap suatu gejala yang menjadi objek penelitian[7] Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengkaji suatu objek tanpa adanya manipulasi dan bersumber pada metode ilmiah atau dari fenomena yang telah diamati.[8] . Penelitian kualitatif ini lebih cenderung bersifat ilmiah dan tanpa adanya pengujian hipotesis.

[6] Nicolae Todeaa dan Doina Maria Tileab, Comparative analysis between the models for financing of education in Romania and the United Kingdom, *Procedia Social and Behavioral Sciences,* 15 (2011) 717–721

[7] Sa'ud, U. S. (2013). Inovasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta

[8] Hanurawan. (2016). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi. Jakarta: Rajawali Press.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono[9] metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan,menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Sistem pembiayaan pendidikan menggunakan pendapatan dan sumber daya yang tersedia tergantung pada situasi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi kebijakan pendidikan, undang-undang pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah, manajemen sekolah Adalah proses pembentukan dan pengoperasian .

Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memenuhi standar kepuasan, maka dapat dilakukan hal berikut:

1. Hitung persentase yang berbeda dari kelompok umur, jenis kelamin, dan tingkat buta huruf.
2. Distribusi sumber daya pendidikan yang efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat untuk mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.

[9] Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Danandjadja, James. (1984). Folklor Indonesia, 9

Menurut Levin[10] Pembiayaan Sekolah adalah proses pendirian dan pengoperasian sekolah di wilayah geografis yang berbeda dan tingkat pendidikan yang berbeda dengan menggunakan pendapatan dan sumber daya yang tersedia. Sedangkan J. Wiseman , ada tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah pemerintah perlu terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan yaitu :

1) Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan di bidang pendidikan merupakan salah satu alat perdagangan dan dapat dilihat sebagai kebutuhan untuk berinvestasi dalam sumber daya manusia atau modal.
2) Pendanaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan siswa untuk menyekolahkan anaknya dan berdampak pada kinerja sosial secara keseluruhan.
3) Dampak faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan

Biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.

a) Biaya investasi satuan pendidikan di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
b) Biaya personal di atas termasuk biaya pelatihan yang harus ditanggung siswa agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara teratur dan berkesinambungan.
c) Biaya operasional satuan pendidikan tersebut di atas adalah sebagai berikut:
    (1) Gaji dan tunjangan terkait upah untuk pendidik dan staf.
    (2) Pelatihan bahan habis pakai atau peralatan dan
    (3) Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

[10] Nanang Fattah , Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris "JURNAL, Pendidikan Dasar " Nomor: 9 - April 2008

Perhitungan biaya pendidikan menurut pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

(a) Skala institusi pendidikan

(b) Jumlah siswa

(c) Tingkat gaji guru (karena pendidikan dianggap sangat padat karya)

(d) Rasio siswa dengan jumlah guru

(e) Kualifikasi guru

(f) Laju pertumbuhan penduduk (terutama di negara berkembang)

(g) Perubahan pendapatan

Sedangkan Jurnal yang ditulis oleh Armida[11] mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Demikian juga John S. Mrophet dalam Rida Fironika KD[12], mengatakan bahwa " pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:

1) Flat Grand Model

Flat Grand Model menggunakansystem distribusi dana, semua distrik atau Kabupaten/kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Daerah yang sumber dayanya kaya raya dan daerah yang sumber daya alamnya tidak mendukung (miskin), untuk membiayai program pendidikan setiap menerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 (satu) tahun yang direfleksikan sebagai kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada sekolah.

[11] Armida. 2001. Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Media Akademika, Vol 26. No. 1: 2001.

[12] Rida Fironika KD, Pembiayaan Pendidikan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 2, 31 2012 http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/211312012/ 3602ARTIKEL_ RIDA.pdf diakses 25 Oktober 2021.

2) Equalization Model

Equalization Model ini bertitik tolak pada ability to pay (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang incomenya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah. Daerah miskin akan mereima 5 per mil ditambah 7 per mil dana dasar daerah yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah Pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Untuk sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber- sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, dan sumber lain. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lain. Serta dari waktu ke waktu".

Berdasarkan pendekatan unsur biaya (ingredient approach), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran yaitu:

a) Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran
b) Pengeluaran untuk tata usaha sekolah
c) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
d) Kesejahteraan pegawai
e) Administrasi Pembinaan teknis education dan
f) Pendataan

Perhitungan biaya pendidikan ditentukan oleh faktor- faktor tersebut. Faktor-faktor ini juga didasarkan pada perhitungan biaya aktual untuk setiap jenis dan rentang kegiatan. Dalam konsep pendanaan pendidikan dasar, ada dua hal penting yang perlu dicermati atau dianalisa. Dengan kata lain, total biaya pendidikan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost). Biaya satuan tingkat sekolah, baik pemerintah, orang tua, atau berbasis masyarakat, adalah total biaya pendidikan tingkat sekolah dan dihabiskan untuk menyelenggarakan pendidikan.dalam setahun.

B. Model-Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Dilihat dari Sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia model-model pembiayaan pendidikan yag diselenggarakan di indonesia adalah sebagai berikut :

1. Sumber Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

   a. BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

   Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) adalah dana pendidikan yang disponsori oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin, terutama yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya. Dana BOS merupakan program pemerintah yang secara langsung mendanai lembaga pendidikan negeri dan swasta, dengan besaran bantuan yang diterima sekolah berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolah dan harga satuan bantuan. BOS menyediakan dana untuk mendukung sekolah untuk menutupi biaya operasional sekolah. Sebagai kepedulian ketika siswa miskin mengalokasikan sumber daya, sekolah wajib membayar siswa miskin biaya kuliah dan kegiatan ekstrakurikuler (pembebasan biaya) dan/atau dukungan (pengurangan). Umumnya, program BOS dilaksanakan sebagai subsidi umum. Program BOS tercakup secara luas dan merata baik dari segi jumlah

sekolah maupun siswa. Sangat sedikit sekolah yang menentang program BOS, dan sekolah pada umumnya relatif mandiri.

Adapun besaran Bantuan Operasional Sekolah masing-masing jenjang sebagai berkut :

a. BOS dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan permendikbud nmor 6 tahun 2021 bab 3 tentang Besaran Alokasi Dana Bos Reguler pasal pasal 5 yaitu :

1) Besaran alokasi dana BOS normal dihitung dengan mengalikan harga satuan tiap daerah dengan jumlah siswa.
2) Satuan biaya untuk setiap daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
3) Jumlah siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data nomor siswa NISN.

Sedangkan system pencairannya dengan menggunakan system tiga tahap, Dalam bab 4 Pasal 8 Permendiknas di jelaskan bahwa: “

1) Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
   a) penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya.
   b) penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan
   c) penyaluran tahap III dilakukan sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan.
2) Penyaluran Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik”.

b. BOS dan BOP dari Dirjen Pendidikan Islam untuk RA dan Madrasah

1) Satuan biaya BOP dan BOS adalah sebagai berikut :

a) RA sebesar Rp 600.000 per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun

b) MI sebesar Rp 900.000 per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun

c) MTs sebesar Rp 1.100.000 per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun

d) MA dan MAK sebesar Rp 1.500.000 per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun

Pencairan dana BOP dan BOS madrasah swasta melalui transfer ke rekening RA/Madrasah penerima secara langsung digunakan melalui dua tahap yaitu "berdasarkan pada persyaratan sebagai berikut :

Tahap I (Januari-Juni)

(a) Surat Permohonan Pencairan Dana BOP/BOS (Formulir BOS-04)

(b) Surat Pernyataan Kebenaran Data Rekening Bank (Formulir BOS-05)

(c) Surat Perjanjian Kerja yang sudah ditanda tangani PPK dan Kepala RA/Madrasah (Formulir BOS-06)

(d) Rencana Kerja dan Anggaran RA/Madrasah (RKARA/RKAM)

(e) Kuitansi bukti penerimaan yan telah ditanda tangani penerima bantuan. (Formulir BOS-10)

Tahap II (Juli-Desember)

(a) Surat Permohonan Pencairan Dana BOP/BOS (Formulir BOS-04)

(b) Surat Pernyataan Kebenaran Data Rekening Bank (Formulir BOS-05)

(c) Surat Perjanjian Kerja yang sudah ditanda tangani PPK dan Kepala RA/Madrasah (Formulir BOS-06)

(d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanaj (SPJTM) (Formulir BOS-07)

(e) Rencana Kerja dan Anggaran RA/Madrasah (RKARA/RKAM)

(f) Kuitansi bukti penerimaan yan telah ditanda tangani penerima bantuan. (Formulir BOS-10)[13]

2) Komponen-Komponen Pembiayaan BOS RA/Madrasah:

(a) Kegiatan Pembelajaran

(b) Kegiatan Ekstrakurikuler

(c) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

(d) Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa

(e) Pengembangan keprofesian guru dan Tenaga Kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah

(f) Pembiayaan honor rutin

(g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Madrasah (30 % non Struktural)

(h) Pengembangan Perpustakaan

(i) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

(j) Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA)

(k) Pengelolaan Madrasah

(l) Langganan Daya dan Jasa

(m) Pembelian/perawatan alat multimedia (termasuk penunjang Ujian Nasional/Asesmen Kompetensi Minimal/Asesmen Kompetisi Siswa Indonesia) termasuk yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran digital di madrasah.

(n) Pembelian/sewa sarana/perlengkapan/peralatan yang diperlukan untuk Mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar di area adapasi kenormalan baru

(o) Pembelian/sewa sarana/perlengkapan/peralatan yang diperlukan dalam rangka pencegahan COVID-19

[13] Direktur Jendral Pendidikan Islam, Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada RA dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah, (Jakarta:2021)

(p) Biaya lain jika seluruh komponen 1-13 telah terpenuhi pendanaannya dari BOP dan BOS.

3) Larangan Penggunaan BOS RA/Madrasah :

(a) disimpan dengan maksud dibungakan

(b) disimpan dan /atau ditransfer dari dan ke rekening pribadi yang digunakan untuk keperluan pribadi

(c) dipinjamkan kepada pihak lain

(d) membeli pernagkat lunak (sofware) atau untuk pelaporan keuangan BOP dan BOS atau sofware sejenis

(e) membiaya kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya

(f) membeli pakaian seragam, sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris)

(g) digunakan untuk rehablitasi sedang dan berat

(h) digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana dengan kategori rusak sedang dan rusak berat

(i) membangun gedung atau ruangan baru

(j) membelilembar kerja siswa

(k) membeli saham

(l) membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional

(m) membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan dan atau

(n) membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber lain."

C. Analisis Model Pembiayaan BOS pada Lembaga Pendidikan Yang Pernah Diterapkan di Indonesia.

Biaya pendidikan di Indonesia tetap menjadi salah satu masalah yang masih diakui penting dan tidak terkait langsung dengan kualitas pendidikan, namun masalah pembiayaan terkait erat dengan kelancaran pembelajaran di sekolah, termasuk pengadaan infrastruktur. ke. Dan sumber belajar. masih banyak sekolah yang belum optimal melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik guru honorer maupun pengadaan sarana dan prasarana belajar, hanya karena alasan finansial.

Tuntutan reformasi dalam hal ini menuntut pendidikan yang murah dan berkualitas, tetapi pendidikan yang berkualitas selalu membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, sekolah perlu mengelola keuangan yang ada untuk menghindari penggunaan pengeluaran yang tidak perlu/tidak direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

Selain itu, analisis rincian model-model pembiayaan pendidikan yang dilakukan di Indonesia meliputi: BOS/BOM dan lain-lain diuraikan dalam dua sisi yaitu Sisi regulasi kebijakan Pemerintah dan sisi lembaga pendidikan sebagai berikut:

a. Regulasi Kebijakan Pemerintah Sistem pencairan dan pelaporan

   1) Periode Tahun 2003-2007:

      a) Sistem pencairan langsungg ke Rekening Sekolah/Madrasah menggunakan Sistim Manual

      b) Sistem laporan menggunakan Sistim Manual yang dikirim ke Kabupaten

      c) Keterlibatan Pengelolaan Dana BOS langsung oleh Pengelola BOS provinsi dan Kabupaten

2) Periode Tahun 2008-2019

Perbedaan dalam periode ini adalah hanya pada sistem pemberkasan dan pelaporan menggunakan sistem Aplikasi.

Analisis Kelebihan:

(1) Sistem ini oleh lembaga pendidikan dirasakan sangat membantu, karena bimbingan dan pembinaan langsung oleh pengelola Dana BOS kabupaten dan dapat berintraksi secara langsung tentang proses pencairan dan pelaporan Dana BOS.

(2) Pengelola Dana BOS kabupaten dapat secara langsung mengontrol dan mengevaluasi sekolah/madrasah yang sudah mencairkan atau melaporkan Dana BOS.

(3) Pengelola Dana BOS kabupaten dapat secara langsung mengevaluasi bentuk pelaporan Dana BOS, sesuai Juknis BOS.

Kelemahan :

(a) Sistem pengelolaan secara langsung oleh Pengelola BOS Provisnsi dan Kabupaten/Kota dalam hal pengawasan tidak dapat diketahui secara obyektif oleh tim Pengelola BOS Pusat.

(b) Dalam hal controling / audit pihak ketiga (Irjen/BPK) belum dapat dilakukam secara maksimal dan menyeluruh, karena sistem audit yang dilakukan adalah sistem sampel dan terbatas.

(c) Dalam hal pengajuan sekolah/madrasah oleh Pengelola BOS kabupaten yang akan diaudit Irjen/BPK masih bersifat sistem tunjuk.

3) Periode Tahun 2020-Sekarang

a) Sistem pencairan langsung ditransfer ke Rekening masing-masing Sekolah/Madrasah

b) Keterlibatan Pengelola BOS provinsi dan Kabupaten sangat kecilt karena sekolah/Madrasah langsung berintraksi ke Pengelola BOS Pusat.

c) Sistem pelaporan menggunakan Sistim Manual yang dikirim langsung ke pusat melalui Aplikasi BOS. Bentuk laporannya berupa : (1) Format Buku Kas Umum, (2) Register Penutupan Kas, (3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (4) Kertas Kerja Persediaan dan (5) Format Laporan Belanja Modal.

Analisis Kelebihan :

(1) Sistem ini oleh lembaga pendidikan terlebih diawal-awal ini dirasakan menyulitkan, akan tetapi sistem ini dapat mendorong Pengelola BOS Sekolah/Madrasah untuk dapat berintraksi dan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal karena bimbingan lewat Daring/Virtual.

(2) Pengelola Dana BOS Pusat dapat secara langsung mengontrol dan mengevaluasi sekolah/madrasah yang sudah mencairkan atau melaporkan Dana BOS.

(3) Pengelola Dana BOS Pusat dapat secara langsung mengevaluasi bentuk pelaporan Dana BOS, sesuai Juknis BOS.

Kelemahan :

(a) Sistem pengelolaan secara langsung oleh Pengelola BOS menyebabkan Pengelola BOS Provisnsi dan Kabupaten/ Kota kurang memiliki peran dalam hal bimbingan dan pengawasan terhadap pengelola BOS di sekolah dan Madrasah.

(b) Bimbingan dan pembinaan langsung oleh pengelola Dana BOS Pusat melalui Daring/Virtual hasilnya belum maksimal. Problemnya banyak kepala sekolah dan Pengelola BOS yang masih kurang kemampuannya dalam penguasan tehnologi Digital.

b. Lembaga Pendidikan

1) Efeketifitas perencanaan anggaran yang tertuang dalam Rencana Anggararan dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) perlu dimaksimalkan, Penyusunan anggaran pembelajaran harus berdasarkan kebutuhan yang riil dan benar-benar sangat dibutuhkan untuk keperluan dalam rangka menunjang penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu.

2) Efisiensi pembiayaan pendidikan sangat ditentukan oleh ketepatan dalam penggu- naan atau mendayagunakan anggaran pendidikan, oleh karena itu harus memeperhatikan skala prioritas, efektifitas biaya dan faktor- faktor input pendidikan yang dapat memacu prestasi belajar peserta didik.

KESIMPULAN

1. Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia bahwa dibebankan kepada pemerintah Pusat, pemerintah Daerah dan Masyarakat.

   Model-model pembiayaan pendidikan di Indonesia yaitu bersumber

   a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa bantuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dan

   b. Orang Tua/ Wali Siswa. Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan antara lain: 1) Uang Pangkal, 2) Uang Sekolah Bulanan / SPP, 3) Biaya Ulangan Tengah Semester, 4) Biaya Ulangan Akhir Semester, Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler, 6) Biaya Kegiatan Praktikum, 7) Pembelian Buku Pelajaran / LKS, 8) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah, 9) Biaya Karyawisata / Bina Mental / Retret, 10) Sumbangan Sosial , 11) Biaya-biaya lainnya.

2. Analisis model-model pembiayaan pendidikan yang pernah diterapkan di Indonesia seperti BOS/BOM dan lain-lain. Dalam regulasi pemerintah

periode pencairan dan pelaporan dana BOS Sekolah dan Madrasah dan PAUD yang telah penulis klasifikasi terdapat kelebihan dan kekurangan dalam implementasinya. Pada periode awal terdapat keterlibatan Pengelola BOS Provinsi dan Kabupaten sehingga dalam proses pemberkasan pencairan dan pelaporan Dana BOS dapat dibimbing dan diawasi langsung. Sedangkan dalam regulasi terakhir proses pemberkasan pencairan dan pelaporan Dana BOS langsung dibimbing dan dibina oleh pengelola BOS Pusat

DAFTAR PUSTAKA

Armida. 2001. Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.

Direktur Jendral Pendidikan Islam, Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada RA dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah, (Jakarta:2021)

Durotun Nafisah, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah, Economic Education Analysis Journal, 6-3, 2017

Fatra dan Edi Harapan, Penerapan Prinsip dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Palembang,Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Volume 2, No. 1, 2017.

Fattah. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Rosda. Bandung

Ferdi W.P, Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Financing of education: a theoritical study, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, 4, Desember 2013

Furchan, A. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: 2011).

http://research.unissula.ac.id/ file/publikasi/211312012/3602ARTIKEL_RIDA.pdf

Jurnal Media Akademika, Vol 26. No. 1 Januari 2001.

Moedzakir. (Desain dan Model Penelitian Kualitatif.). Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, (Malang: 2010)

Nanang Fattah , Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris JURNAL, Pendidikan Dasar, Nomor: 9 - April 2008

Nicolae Todeaa dan Doina Maria Tileab, Comparative analysis between the models for financing of education in Romania and the United Kingdom, Procedia Social and Behavioral Sciences, 15 (2011)

Permendikbud RI, Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, (Jakarta: 2021)

Rida Fironika KD, Pembiayaan Pendidikan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 2, 31 2012

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Danandjadja, James. (1984). Folklor Indonesia.